

1. Nama OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  2. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
  4. SubKegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan
  5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
- 

#### A. Latar Belakang

Dasar Hukum adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu dibuat.

##### a) Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk merencanakan perencanaan target kinerja dan kebutuhan dana dari berbagai program, kegiatan dan Subkegiatan di masa yang akan datang.

##### b) Masukan

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 30.000.000 (*terbilang : tiga puluh juta rupiah,-*). Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*

**c) Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen dengan indikator “Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan” dengan target 2(dua) Dokumen.

**d) Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Dokumen perencanaan yang berkualitas.

**e) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan dengan indicator “persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu” dengan target 100%.

**f) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPKPP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang penyusunan Rencana Kerja terkait target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan
3	Input di Aplikasi e-Planning	Masing-masing bidang mengumpulkan RENJA pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi e-planning melalui user OPD
4	Desk – Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada bidang-bidang dan bagian perencanaan dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RENSTRA DPKPP dan RENJA yang disusun
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen.
6	Penyusunan Dokumen	Laporan yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen yakni: Renja 2024 dan Renja Perubahan 2024



Rencana Kas Penggunaan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  
 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD  
 Tahun 2024

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket.
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.000.000,00		2.250.000,00			2.250.000,00			2.250.000,00			2.250.000,00		
2	Belanja Alat Tulis Kantor	2.576.500,00		644.125,00			644.125,00			644.125,00			644.125,00		
3	Belanja Alat Kertas dan Cover	2.268.000,00		2.268.000,00			-			-			-		
4	Belanja Bahan Cetak	1.925.000,00		1.925.000,00			-			-			-		
4	Belanja Bahan Komputer	2.974.000,00		-			2.974.000,00			-			-		
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00		800.000,00			800.000,00			800.000,00			800.000,00		
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00		
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.170.000,00		4.000.000,00			9.170.000,00								
	<b>Total</b>	<b>47.113.500,00</b>		<b>14.887.125,00</b>			<b>18.838.125,00</b>			<b>6.694.125,00</b>			<b>6.694.125,00</b>		

Mali, 18 Agustus 2023  
 Mengetahui,  
 Pjt. Kepala Disperkimtan

*(Signature)*  
**ANDI WIJA HASAN, ST**  
 NIP. 197403232003121004

1. Nama OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  2. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
  4. SubKegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
  6. PPK : Andi Wija Hasan, ST
- 

#### A. Latar Belakang

Dasar Hukum adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD perlu dibuat.

##### a) Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk merencanakan Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD dari berbagai program, kegiatan dan Subkegiatan di masa yang akan datang.

##### b) Masukan

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 5.000.000,- (*terbilang : Lima Juta Rupiah,-*). Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*

**c) Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen dengan indikator “Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu” dengan target 2(dua) Dokumen.

**d) Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu yang berkualitas.

**e) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator “persentase dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu” dengan target 100%.

**f) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPKPP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang penyusunan Rencana Kerja terkait target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan
3	Input di Aplikasi SIPD	Masing-masing bidang mengumpulkan RKA pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi e-SIPD melalui user masing-masing Bidang
4	Desk – Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada bidang-bidang dan bagian perencanaan dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RENSTRA DPKPP dan RENJA yang disusun
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen.
6	Penyusunan Dokumen RKA	Dokumen RKA yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen yakni: RKA Perubahan 2024 dan RKA Pokok 2025



**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN  
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD  
TAHUN 2024**

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket.
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00				1.150.000,00									
2	Belanja Alat Kertas dan Cover	825.000,00				825.000,00									
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00				1.600.000,00									
	<b>Total</b>	<b>5.000.000,00</b>	-			<b>5.000.000,00</b>			-			-			

Malili, 18 Agustus 2023

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan



**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19740323 2003121004

1. Nama OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  2. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
  4. SubKegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
  6. PPK : Andi Wija Hasan, ST
- 

#### A. Latar Belakang

Dasar Hukum adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD perlu dibuat.

##### a) Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk menetapkan Anggaran SKPD dari berbagai program, kegiatan dan Subkegiatan di masa yang akan datang.

##### b) Masukan

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 5.000.000,- (*terbilang : Lima Juta Rupiah,-*). Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*

**c) Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen dengan indikator “Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu” dengan target 2(dua) Dokumen.

**d) Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu yang berkualitas.

**e) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator “persentase dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu” dengan target 100%.

**f) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPKPP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang penyusunan Rencana Kerja terkait target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan
3	Input di Aplikasi SIPD	Masing-masing bidang mengumpulkan DPA pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi SIPD melalui user masing-masing Bidang
4	Desk – Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada bidang-bidang dan bagian perencanaan dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RENSTRA DPKPP dan RENJA yang disusun
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen.
6	Penyusunan Dokumen DPA	Dokumen DPA yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen yakni: DPA Perubahan 2024 dan DPA Pokok 2025



**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN  
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD  
TAHUN 2024**

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket.
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00				-			670.000,00						
2	Belanja Alat Kertas dan Cover	1.810.000,00				-			1.810.000,00						
3	Belanja Bahan Cetak	1.520.000,00				-			1.520.000,00						
4	Belanja Bahan Komputer	1.000.000,00				-			1.000.000,00						
	<b>Total</b>	<b>5.000.000,00</b>	-			-			<b>5.000.000,00</b>			-			

Malili, 18 Agustus 2023

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanaha

**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19740323 2003121004

1. Nama OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  2. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  4. SubKegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
  6. PPK : Andi Wija Hasan, ST
- 

#### A. Latar Belakang

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah wujud respon atas pendekatan pembangunan yang selama ini dianggap tidak tepat. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Salah satu bagian penting dalam SPPN adalah monitoring dan evaluasi. SPPN secara jelas mengamankan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 didefinisikan bahwa monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam waktu tertentu dengan tujuan dapat untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dan segera memerlukan perbaikan terkait sistem, prosedur dan proses serta kebijakan itu sendiri sehingga menjamin tujuan kegiatan dapat dicapai lebih optimal. Oleh karena kualitas dan keberhasilan pembangunan ditentukan kualitas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan sebelumnya. Karena evaluasi harus memberikan informasi yang obyektif tentang kelemahan dan kelebihan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, maka hasil monitoring evaluasi sangat penting untuk bahan masukan dan saran dalam menentukan kelanjutan program atau kegiatan berikutnya.

Dari uraian di atas, maka peran monitoring dan evaluasi dalam proses pelaksanaan kegiatan sangat penting. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dibuat.

**b) Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni:

1. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pada Dinas;
2. Sebagai bahan laporan ke pimpinan.

**c) Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 57.339.200.000 (*terbilang : Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Rupiah,-*). Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*

**d) Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya laporan dengan indikator "Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat pelaksanaan kegiatan Dinas yang disusun" dengan target 10 (sepuluh) Dokumen.

**e) Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi.

**f) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

**g) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPKPP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang input realisasi keuangan dan kinerja di aplikasi e-monev serta pemberitahuan jadwal desk evaluasi Bidang dan ekspose hasil evaluasi oleh pimpinan
3	Input di Aplikasi e-	Masing-masing bidang mengumpulkan realisasi

	monev	keuangan dan kinerja pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi e-monev melalui user OPD
4	Desk – Evaluasi	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada bidang-bidang dan Evaluator (Kadis) dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dimasing-masing OPD. Adapun konten yang dievaluasi: Format 1 – Laporan Realisasi Anggaran TA 2019, Format 2 – Laporan Evaluasi Kegiatan Prioritas (KP1), Format 3a – Rekapitulasi Kemajuan Fisik (Konstruksi), Format 3b – Rekapitulasi Kemajuan Pengadaan Barang/Belanja Modal, Format 4 – Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK), F Format 6 – Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan selanjutnya untuk kemudian disampaikan pada ekspose hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat dan Bapelitbangda. Perlu diperhatikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan, bersifat aplikabel, <i>to the point</i> dan padat (tidak perlu terlalu banyak – untuk memudahkan/menghitung rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (ini penting sebagai ukuran keberhasilan capaian outcome/hasil kegiatan).
6	Kunjungan Lapangan	Kunjungan lapangan sebagai upaya identifikasi, verifikasi, konfirmasi dan validasi atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang telah dilaksanakan
7	Penyusunan Laporan	Laporan yang disusun sebanyak 10 (sepuluh) dokumen laporan, yakni: laporan hasil evaluasi Triwulan I s.d IV Tahun 2024, Laporan hasil evaluasi RKPD triwulan 1s.d IV, LKPJ dan LPPD Tahun 2024



**EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket.	
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
			Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.500,00	787.750,00						787.750,00							
2	Belanja Alat Kertas dan Cover	2.259.500,00	1.129.750,00						1.129.750,00							
3	Belanja Bahan Cetak	1.744.200,00	872.100,00						872.100,00							
4	Belanja Bahan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00													
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00			800.000,00				
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.560.000,00	15.853.333,33			10.000.000,00			21.706.666,67							
	<b>Total</b>	<b>57.339.200,00</b>	<b>20.442.933,33</b>			<b>10.800.000,00</b>			<b>25.296.266,67</b>			<b>800.000,00</b>				

Malili, 18 Agustus 2023

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan:



**ANDI WIJA HASAN, ST**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19740323 2003121004

1. Nama OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  2. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. SubKegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
- 

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka menunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah , sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka perlu adanya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sub kegiatan ini untuk menunjang tupoksi dari bagian kepegawaian OPD dalam hal pelaporan bersifat bulanan yang melaporkan kondisi kepegawaian baik itu berupa mutasi, naik pangkat, KGB, SKP, Satya Lencana dan Pensiun.

**b) Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni kelengkapan data administrasi kepegawaian pada perumahan kawasan permukiman dan pertanahan yang teratur, terarah dan terkendali.

**c) Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 34.272.500 (*terbilang : Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah,-*). Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*

**d) Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan indikator “ Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian” dengan target 12(dua belas) dokumen.

**e) Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya kelengkapan data administrasi kepegawaian.

**f) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur dengan indikator “persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah” dengan target 100%.

**g) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPKPP tentang PPTK/PPK
2	Penyusunan Laporan	Laporan yang disusun sebanyak 1 laporan yang memuat data-data kegiatan-kegiatan yang diikuti

**URAIAN SUB KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA**

No	Uraian Sub Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN – TAHUN 2024																																Ket.																
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus					September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	SK PPTK/PPK	■																																																
2	Surat Masuk	■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■								
3	Penyusunan Laporan												■												■																					■				

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN  
PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
TAHUN 2024**

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket.	
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	-			405.000,00										
2	Belanja Alat Kertas dan Cover	2.152.500,00	2.152.500,00			-										
3	Belanja Bahan Cetak	1.275.000,00				1.275.000,00										
4	Belanja Bahan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00													
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00			800.000,00				
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00				
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.240.000,00				7.120.000,00			7.120.000,00							
	<b>Total</b>	<b>34.272.500,00</b>	<b>6.952.500,00</b>			<b>12.600.000,00</b>			<b>10.920.000,00</b>			<b>3.800.000,00</b>				

Malili, 18 Agustus 2023

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan I



**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

1. Nama OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  2. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. SubKegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
- 

#### **A. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan tugas dibutuhkan aparatur yang cerdas, ulet dan memahami tugas teknis yang diberikan. Untuk memperkuat kapasitas aparatur maka diselenggarakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dan pengembangan sumber daya manusia bagi setiap aparatur. Kegiatan bimtek dan diklat yang akan diikuti meliputi beberapa bidang yaitu mengenai penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan administrasi aset Pemda, keuangan, kepegawaian dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.

#### **b) Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan agar terwujud penyelenggaraan pembangunan perumahan dan penataan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang teratur, terarah dan terkendali.

#### **c) Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 116.530.000 (*terbilang : Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah,-*). Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*

#### **d) Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelatihan, bimtek dan diklat dengan indikator "Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan Pelatihan " dengan target 18(delapan belas) orang.

**e) Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas Aparatur.

**f) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur dengan indikator "persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah" dengan target 100%.

**g) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPKPP tentang PPTK/PPK
2	Surat Masuk	Mengecek surat permintaan peserta untuk mengikuti Bimtek, diklat, sosialisasi dll
3	Penyusunan Laporan	Laporan yang disusun sebanyak 1 laporan yang memuat data-data kegiatan-kegiatan yang diikuti

**URAIAN SUB KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA**

No	Uraian Sub Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN – TAHUN 2024																																Ket.																
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus					September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	SK PPTK/PPK																																																	
2	Surat Masuk																																																	
3	Penyusunan Laporan																																																	

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN 2024**

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket.
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Okt	No v	Des	
1	Belanja Perjalanan Dinas	54.245.000,00	13.561.250,00			13.561.250,00			13.561.250,00			13.561.250,00			
2	Belanja Bimbingan Teknis	55.530.000,00	13.882.500,00			13.882.500,00			13.882.500,00			13.882.500,00			
	<b>Total</b>	<b>109.775.000,00</b>	<b>27.443.750,00</b>			<b>27.443.750,00</b>			<b>27.443.750,00</b>			<b>27.443.750,00</b>			

Malili, 18 Agustus 2023

Mengetahui,

Pit. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan,

**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19740323 2003121004

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. SKPD            | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |
| 4. Sub. Kegiatan   | : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |
| 5. Lokasi Kegiatan | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

## II. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan bahan cetak/penggandaan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan bahan cetak/penggandaan Kantor sebagai kebutuhan yang mendasar sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan administrasi kantor.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok sekretariat.

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 18.640.000 (terbilang : *Delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*)

#### **D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak, penggandaan dan belanja jilid yang diusulkan.

#### **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah belanja cetak, penggandaan dan jilid terlaksana dengan tepat

#### **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan belanja untuk pelaksanaan tugas rutin kantor yang menunjang kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan dengan presentase target 95%

#### **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Rincian Belanja

No	Uraian	Koefisien	Satuan
1.	<b>Belanja Cetak</b>		
	- Cetak Spanduk	24	lembar
	- Standing + Banner	10	buah
	- Jilid Laminating	30	Eks
	- Jilid Biasa	40	Eks
	- Foto Copy	8200	lembar

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

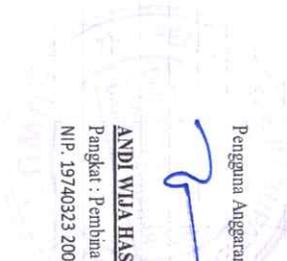
No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nov	Des	
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	18.640.000	4.660.000			4.660.000			4.660.000			4.660.000			
	<b>Jumlah</b>	<b>18.640.000</b>	<b>4.660.000</b>			<b>4.660.000</b>			<b>4.660.000</b>			<b>4.660.000</b>			

Mallii, 5 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



**ANDI WIJA HASAN, ST**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. 19740323 200312 1 004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. SKPD            | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |
| 4. Sub. Kegiatan   | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |
| 5. Lokasi Kegiatan | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).
  6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7)
  7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
  8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/ I/ TAHUN 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
  9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

## II. Gambaran Umum

Dalam rangka pencapaian target kinerja ASN, diperlukan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas

## **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
2. Terwujudnya ASN yang profesionalisme dalam melaksanakan tugas yang tujuan akhirnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada public/masyarakat.
3. Mendorong percepatan peningkatan kinerja ASN dengan menggali dan mencari penyebab rendahnya atau kurangnya kinerja ASN selama ini, dan mecarikan solusi permasalahannya dengan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

## **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.991.808.400,- (terbilang : *dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*)

## **D. Keluaran (Output)**

- Terpenuhinya dana kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Terpenuhinya dana untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

-

## **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam pelaksanaan tugas

## **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

#### **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan sebanyak 20 pegawai
3. Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan dibayarkan sesuai peraturan yang berlaku

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)		
			Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III					Triwulan IV	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des			
1.	Belanja Gaji pokok PNS	1.297.511.811	360.000.000			360.000.000			323.755.401			253.756.410					
2.	Tunjangan Keluarga PNS	157.819.886	72.817.484			35.198.242			35.198.243			14.605.917					
3.	Tunjangan Jabatan PNS	203.005.103	60.000.000			48.000.000			48.000.000			47.005.103					
4.	Tunjangan Fungsional PNS	103.305.828	45.826.000			19.159.943			19.159.943			19.159.942					
5.	Tunjangan Beras PNS	114.486.791	28.621.698			28.621.698			28.621.698			28.621.697					
6.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.681.191	2.520.000			720.397			720.397			720.397					
7.	Pembulatan Gaji PNS	18.790	7.750			3.347			3.347			4.346					
8.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.110.980.000	300.000.000			300.000.000			260.000.000			250.980.000					
	<b>Jumlah</b>	<b>2.991.809.400</b>	<b>869.792.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.703.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.459.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.853.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Mallili, 5 Oktober 2023

Pt. Kepala Dinas,

**ANDI WJIA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. SKPD            | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan                           |
| 2. Program         | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 |
| 3. Kegiatan        | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |
| 4. Sub. Kegiatan   | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
| 5. Lokasi Kegiatan | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan                           |
| 6. Sumber Dana     | : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  |
| 7. PPTK            | : <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).
  6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7)

## II. Gambaran Umum

Penyusunan LPP APBD ini dimaksudkan supaya adanya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah serta tertibnya pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyusun Laporan Keuangan Semesteran tepat waktu guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola selama satu semester dan prognosis 6 bulan berikutnya dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan kerugian keuangan daerah

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 74.429.000,- (terbilang : *tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh Sembilan rupiah*)

**D. Keluaran (Output)**

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Laporan Keuangan akhir tahun

**E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam pelaksanaan tugas

**F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi pengelolaan laporan keuangan capaian kinerja program

**G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Penyusun dokumen laporan keuangan akhir tahun
3. Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan dibayarkan sesuai peraturan yang berlaku

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ker*)			
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des				
1	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengebela Keuangan	28.080.000	7.020.000			7.020.000			7.020.000			7.020.000						
2	Belanja ATK	1.044.000	500.000			544.000												
3	Belanja Kertas dan Cover	845.000	845.000															
4	Belanja Cetak	2.430.000	1.215.000			1.215.000												
5	Belanja Bahan Komputer	550.000	550.000															
6	Belanja Makan Minum Rapat	3.080.000	455.000			455.000			420.000			420.000						
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.400.000	10.290.000			10.290.000												
	<b>Jumlah</b>	<b>74.429.000</b>	<b>20.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mallili, 5 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas.

**ANDI WJIA HASAN, ST**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP. 19740323 200312 1 004

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. SKPD            | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah  |
| 4. Sub. Kegiatan   | : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                      |
| 5. Lokasi Kegiatan | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

- Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

## II. Gambaran Umum

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 7.799.600 (terbilang : *tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah*)

**D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui jumlah retribusi milik daerah

**E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pelaporan retribusi tepat waktu

**F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya stabilitas ekonomi daerah.

**G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. Melakukan inventarisasi fisik aset milik daerah
2. Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap bulannya
3. Melaporkan hasil retribusi milik pemerintah daerah

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

**Palaporan Pengelolaan Rekrutasi Daerah**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola keuangan	6.840.000	1.710.000			1.710.000								1.710.000			
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000		124.000													
3.	Belanja Kertas dan Cover	300.000		300.000													
4.	Belanja Bahan Cetak	315.000		315.000													
4.	Belanja Bahan Komputer	220.000		220.000													
	<b>Jumlah</b>	<b>7.799.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>959.000</b>		<b>1.710.000</b>				<b>1.710.000</b>				<b>1.710.000</b>			

Mallili, 5 Oktober 2023

Plt. Kepala Dmas,

**ANDI WILIA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. SKPD            | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan        |
| 2. Program         | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota    |
| 3. Kegiatan        | : Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |
| 4. Sub. Kegiatan   | : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 5. Lokasi Kegiatan | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan        |
| 6. Sumber Dana     | : Pendapatan Asli Daerah (PAD)                             |
| 7. PPTK            | : <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                               |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.15.1/35940/Keuda Perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/I/TAHUN 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

## II. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara efektif dan efisien diperlukan adanya sarana informasi terkini yang akurat melalui media cetak berupa surat kabar dan bahan bacaan lainnya untuk menambah wawasan dan informasi pegawai. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar



**RENCAANA KAS PENGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Belanja Kabar/Majalah	13.920.000	3.480.000			3.480.000			3.480.000			3.480.000			
	Jumlah	13.920.000	3.480.000	0		3.480.000			3.480.000			3.480.000			

Malili, 5 Oktober 2023

Pt. Kepala Dinas,

**ANDI WILAHASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).
  6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
  7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
  8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/ I/ TAHUN 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
  9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

## II. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan alat dan bahan kebersihan kantor serta meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagai kebutuhan yang mendasar sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan administrasi kantor.

## **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Meningkatkan kenyamanan kerja.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas .
3. Meningkatkan kemampuan berfikir kreatif.

## **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 13.186.000 (terbilang : *tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

## **D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya jumlah Alat dan bahan kebersihan yang diusulkan.

## **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah alat dan bahan logistic kantor tersedia sesuai dengan kebutuhannya

## **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan alat dan bahan logistik kantor untuk pelaksanaan tugas rutin kantor yang menunjang kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan dengan presentase target 95%

## **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan oleh PPTK
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun anggaran dengan tujuan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencegah adanya pemborosan penggunaan alat dan bahan kantor lainnya.

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)
			Jan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	471.000	471.000												
2	Belanja Bahan-bahan Lainnya	12.715.000	4.000.000			4.000.000			4.205.000						
	<b>Jumlah</b>	<b>13.186.000</b>	<b>4.471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mallili, 3 Oktober 2023

Pt. Kepala Dinas,

**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik      |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

## II. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan alat komunikasi, air dan listrik
2. Memperlancar administrasi perkantoran
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 84.865.000 (terbilang : *delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*)

#### **D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui jumlah rekening air dan listrik yang dibayar setiap bulan.

#### **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah presentase rata-rata pencapaian dalam penggunaan air dan listrik.

#### **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

#### **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Menyiapkan Kwitansi
3. Menyiapkan ATK

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

## II. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan bahan cetak/penggandaan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan bahan cetak/penggandaan Kantor sebagai kebutuhan yang mendasar sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan administrasi kantor.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok sekretariat.

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 18.640.000 (terbilang : *Delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*)

#### **D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak, penggandaan dan belanja jilid yang diusulkan.

#### **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah belanja cetak, penggandaan dan jilid terlaksana dengan tepat

#### **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan belanja untuk pelaksanaan tugas rutin kantor yang menunjang kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan dengan presentase target 95%

#### **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Rincian Belanja

No	Uraian	Koefisien	Satuan
1.	<b>Belanja Cetak</b>		
	- Cetak Spanduk	24	lembar
	- Standing + Banner	10	buah
	- Jilid Laminating	30	Eks
	- Jilid Biasa	40	Eks
	- Foto Copy	8200	lembar

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

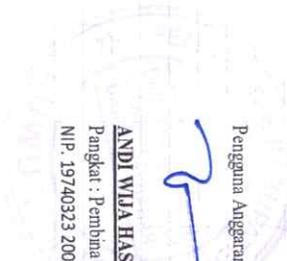
No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nov	Des	
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	18.640.000	4.660.000			4.660.000			4.660.000			4.660.000			
	<b>Jumlah</b>	<b>18.640.000</b>	<b>4.660.000</b>			<b>4.660.000</b>			<b>4.660.000</b>			<b>4.660.000</b>			

Mallii, 5 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



**ANDI WIJA HASAN, ST**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. 19740323 200312 1 004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).
  6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7)
  7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
  8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/ I/ TAHUN 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
  9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

## II. Gambaran Umum

Dalam rangka pencapaian target kinerja ASN, diperlukan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas

## **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
2. Terwujudnya ASN yang profesionalisme dalam melaksanakan tugas yang tujuan akhirnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada public/masyarakat.
3. Mendorong percepatan peningkatan kinerja ASN dengan menggali dan mencari penyebab rendahnya atau kurangnya kinerja ASN selama ini, dan mecarikan solusi permasalahannya dengan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

## **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.991.808.400,- (terbilang : *dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*)

## **D. Keluaran (Output)**

- Terpenuhinya dana kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Terpenuhinya dana untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

-

## **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam pelaksanaan tugas

## **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

#### **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan sebanyak 20 pegawai
3. Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan dibayarkan sesuai peraturan yang berlaku

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)
			Jan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des	
1.	Belanja Gaji pokok PNS	1.297.511.811	360.000.000			360.000.000			323.755.401			253.756.410			
2.	Tunjangan Keluarga PNS	157.819.886	72.817.484			35.198.242			35.198.243			14.605.917			
3.	Tunjangan Jabatan PNS	203.005.103	60.000.000			48.000.000			48.000.000			47.005.103			
4.	Tunjangan Fungsional PNS	103.305.828	45.826.000			19.159.943			19.159.943			19.159.942			
5.	Tunjangan Beras PNS	114.486.791	28.621.698			28.621.698			28.621.698			28.621.697			
6.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.681.191	2.520.000			720.397			720.397			720.397			
7.	Pembulatan Gaji PNS	18.790	7.750			3.347			3.347			4.346			
8.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.110.980.000	300.000.000			300.000.000			260.000.000			250.980.000			
	<b>Jumlah</b>	<b>2.991.809.400</b>	<b>869.792.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.703.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.459.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.853.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mallili, 5 Oktober 2023

Pt. Kepala Dinas,

**ANDI WJHA HASAN, ST**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP. 19740323 200312 1 004

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan                           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 |
| 3. Kegiatan        | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan                           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)  |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).
  6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7)

## II. Gambaran Umum

Penyusunan LPP APBD ini dimaksudkan supaya adanya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah serta tertibnya pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyusun Laporan Keuangan Semesteran tepat waktu guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola selama satu semester dan prognosis 6 bulan berikutnya dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan kerugian keuangan daerah

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 74.429.000,- (terbilang : *tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh Sembilan rupiah*)

**D. Keluaran (Output)**

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Laporan Keuangan akhir tahun

**E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam pelaksanaan tugas

**F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi pengelolaan laporan keuangan capaian kinerja program

**G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Penyusun dokumen laporan keuangan akhir tahun
3. Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan dibayarkan sesuai peraturan yang berlaku

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ker*)			
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des				
1	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengebela Keuangan	28.080.000	7.020.000			7.020.000			7.020.000				7.020.000					
2	Belanja ATK	1.044.000	500.000			544.000												
3	Belanja Kertas dan Cover	845.000	845.000															
4	Belanja Cetak	2.430.000	1.215.000			1.215.000												
5	Belanja Bahan Komputer	550.000	550.000															
6	Belanja Makan Minum Rapat	3.080.000	455.000			455.000			420.000				420.000					
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.400.000	10.290.000			10.290.000												
	<b>Jumlah</b>	<b>74.429.000</b>	<b>20.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mallili, 5 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas.

**ANDI WJIA HASAN, ST**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP. 19740323 200312 1 004

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah  |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                      |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

- Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

## II. Gambaran Umum

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 7.799.600 (terbilang : *tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah*)

**D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui jumlah retribusi milik daerah

**E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pelaporan retribusi tepat waktu

**F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya stabilitas ekonomi daerah.

**G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. Melakukan inventarisasi fisik aset milik daerah
2. Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap bulannya
3. Melaporkan hasil retribusi milik pemerintah daerah

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola keuangan	6.840.000	1.710.000			1.710.000								1.710.000			
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000		124.000													
3.	Belanja Kertas dan Cover	300.000		300.000													
4.	Belanja Bahan Cetak	315.000		315.000													
4.	Belanja Bahan Komputer	220.000		220.000													
	<b>Jumlah</b>	<b>7.799.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>959.000</b>		<b>1.710.000</b>				<b>1.710.000</b>				<b>1.710.000</b>			

Mallili, 5 Oktober 2023

Plt. Kepala Dmas,

**ANDI WILIA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. SKPD            | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan        |
| 2. Program         | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota    |
| 3. Kegiatan        | : Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |
| 4. Sub. Kegiatan   | : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 5. Lokasi Kegiatan | : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan        |
| 6. Sumber Dana     | : Pendapatan Asli Daerah (PAD)                             |
| 7. PPTK            | : <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                               |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.15.1/35940/Keuda Perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/I/TAHUN 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

## II. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara efektif dan efisien diperlukan adanya sarana informasi terkini yang akurat melalui media cetak berupa surat kabar dan bahan bacaan lainnya untuk menambah wawasan dan informasi pegawai. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 13.920.000 (terbilang : *tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*)

### **D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui jumlah bahan bacaan yang dibayarkan setiap bulannya

### **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah presentase rata-rata pencapaian dalam penyediaan bahan bacaan dan perturan perundang-undangan

### **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses penyediaan bahan bacaan untuk menambah wawasan dan informasi bagi pegawai

### **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

#### 1. Belanja Surat Kabar/Majalah :

- Koran Lokal                      60 eksemplar
- Koran Regional                36 eksemplar

2. Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan setiap bulannya.

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des	
1.	Belanja Kabar/Majalah	13.920.000	3.480.000			3.480.000			3.480.000			3.480.000			
	Jumlah	13.920.000	3.480.000	0		3.480.000			3.480.000			3.480.000			

Malili, 5 Oktober 2023

Pt. Kepala Dinas,

**ANDI WILAHASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).
  6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
  7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
  8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/ I/ TAHUN 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
  9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51 /F-04/ I / Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

## II. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan alat dan bahan kebersihan kantor serta meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagai kebutuhan yang mendasar sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan administrasi kantor.

## **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Meningkatkan kenyamanan kerja.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas .
3. Meningkatkan kemampuan berfikir kreatif.

## **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 13.186.000 (terbilang : *tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

## **D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya jumlah Alat dan bahan kebersihan yang diusulkan.

## **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah alat dan bahan logistic kantor tersedia sesuai dengan kebutuhannya

## **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan alat dan bahan logistik kantor untuk pelaksanaan tugas rutin kantor yang menunjang kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan dengan presentase target 95%

## **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan oleh PPTK
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun anggaran dengan tujuan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencegah adanya pemborosan penggunaan alat dan bahan kantor lainnya.

**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN**

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ket*)
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	471.000	471.000												
2	Belanja Bahan-bahan Lainnya	12.715.000	4.000.000			4.000.000			4.205.000						
	<b>Jumlah</b>	<b>13.186.000</b>	<b>4.471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Malili, 3 Oktober 2023

Pt. Kepala Dinas,

**ANDI WILIA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004



## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024 (ANGGARAN POKOK)**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. SKPD            | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 2. Program         | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Kegiatan        | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |
| 4. Sub. Kegiatan   | : | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik      |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan           |
| 6. Sumber Dana     | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                |
| 7. PPTK            | : | <b>ANDI WIJA HASAN, ST</b>                                  |
- 

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

## II. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

### **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan alat komunikasi, air dan listrik
2. Memperlancar administrasi perkantoran
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

### **C. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 84.865.000 (terbilang : *delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*)

#### **D. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui jumlah rekening air dan listrik yang dibayar setiap bulan.

#### **E. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah presentase rata-rata pencapaian dalam penggunaan air dan listrik.

#### **F. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

#### **G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

1. SK PPK/PPTK
2. Menyiapkan Kwitansi
3. Menyiapkan ATK

---

# KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

## APBD POKOK TA. 2024

---

Unit Keja	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Bidang	:	Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Program	:	1. Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Sub-Kegiatan	:	a.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Kegiatan	:	b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub-Kegiatan	:	b.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni b.2. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
Program	:	2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	:	a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub-Kegiatan	:	a.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

### A. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi-sektoral, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Persoalan yang dihadapi pun tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

1. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak huni merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri.
2. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak huni.

Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan dan perundang-undangan yang bersifat memayungi, layanan

kemudahan dalam perizinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan lain sebagainya.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan dan perundang-undangan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu.

Salah satu keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya sarana dan prasarana yang layak di daerah tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang perkembangan fisik di daerah yang bersangkutan.

### **Kabupaten Luwu Timur dengan Visi: "Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya" yang artinya:**

**Berkelanjutan** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Lebih maju** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Berlandas nilai agama dan budaya** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta **Misi:**

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas.
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Kabupaten Luwu Timur mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik pertumbuhan penduduknya maupun sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warganya yang salah satu diantaranya pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memandang perlu adanya perencanaan yang sistematis dan tepat guna pada kegiatan tersebut di atas, dengan harapan agar didapat hasil perencanaan matang yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah teknis dan dapat diaplikasikan di lapangan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan yang berkualitas untuk mendukung geliat dan mobilitasi perekonomian masyarakat Luwu Timur

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Luwu Timur, dalam upaya untuk menjaga Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan agar Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang bersangkutan tidak bertambah rusak sehingga dapat menunjang perkembangan perekonomian dan menyediakan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang cukup bila terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

Atas dasar pemikiran tersebut Karangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) ini, untuk digunakan sebagai Pedoman dan Acuan Kerja dalam Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

## **B. TUJUAN**

Perbaikan sarana dan prasarana pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman dalam kondisi mantap guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya akses dan mobilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah setempat, mendorong pengembangan kepariwisataan, mewujudkan layanan prima pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur transportasi, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

## **C. SASARAN**

Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran pokok dari Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ada pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, adalah :

1. Tersedianya kondisi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang mantap untuk mendukung kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Tersedianya data kondisi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang up to date dan akurat.

#### **D. OUTPUT DAN OUTCOME**

Menu Kegiatan: Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman  
(Terlampir)

#### **E. PENERIMA MANFAAT**

Kelancaran arus lalu lintas orang dan barang serta rumah layak huni untuk seluruh Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman TA. 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

#### **F. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN**

Menu Kegiatan: Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman  
(Terlampir)

#### **G. DUKUNGAN APBD NON-DAK**

Pemerintah Daerah Luwu Timur tidak mengusulkan dana pendukung. Adapun biaya koordinasi (jika ada) selama mengikuti kegiatan DAK bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur.

#### **H. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA**

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

#### **I. METODE PELAKSANAAN**

Untuk Kegiatan Fisik, Metode Pelaksanaan dilakukan dengan cara Kontraktual.

#### **J. KETERANGAN LAINNYA**

Penyampaian laporan dilakukan setiap minggu dan triwulanan secara manual. Laporan triwulanan bidang infrastruktur dilakukan oleh setiap bidang pada tiap-tiap akhir triwulan dengan materi pelaporan yang meliputi data umum, data dasar, dan data pelaksanaan kegiatan.

Malili, 16 Oktober 2023  
Kepala Bidang  
  
JANTE SAMPE, ST  
NIR. 198002102009021003

## Lampiran

### D. OUTPUT DAN OUTCOME

Program : Kawasan Permukiman

Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

No.	Lokasi	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Satuan Output	Outcome
<b>Sub-Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</b>					
1.	Tersebar	Monev Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi

Program : Kawasan Permukiman

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

No.	Lokasi	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Satuan Output	Outcome
<b>Sub-Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>					
1.	Tersebar	Monev Rumah Tidak Layak Huni	160	Unit	Terlaksananya Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki
<b>Sub-Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</b>					
1	Tersebar Kab. Luwu Timur	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur		Meter	Memperbaiki/mempertahankan kualitas bangunan

		Biaya Desain Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
2	Wotu	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
3	Tomoni Timur	Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik

		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
4	Malili	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
5	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
6	Wotu	Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu		Meter	Bangunan jembatan/plat duicker dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jembatan/plat duicker sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
7	Wotu	Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu		Meter	Bangunan jembatan/plat duicker dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jembatan/plat duicker sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
--	--	--	---	----	--

Program : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

No.	Lokasi	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Satuan Output	Outcome
<b>Sub-Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</b>					
1	Malili	Pembangunan Trotoar Kawasan Lingkungan Permukiman Kelurahan Malili Kec. Malili		Meter	Akses jalan khusus dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Supervisi Pembangunan Trotoar Kawasan Lingkungan Permukiman Kelurahan Malili Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Trotoar Kawasan Lingkungan Permukiman Kelurahan Malili Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
2	Burau	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik

		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
3	Wotu	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
4	Malili	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
5	Malili	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
6	Malili	Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
7	Wasuponda	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
8	Wasuponda	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan

9	Wasuponda	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
10	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
11	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa

		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
12	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
13	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik

		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
14	Towuti	Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
15	Towuti	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
16	Towuti	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
17	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan

18	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
19	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
20	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa

		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
21	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
22	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik

		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
23	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
24	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
25	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
26	Towuti	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan

27	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
28	Towuti	Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
29	Burau	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan

		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
30	Burau	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
31	Burau	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik

		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
32	Wotu	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
33	Wotu	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
34	Wotu	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
35	Kalaena	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan

36	Angkona	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
37	Angkona	Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
38	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan

		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
39	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
40	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik

		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
41	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti		Meter	Akses jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
42	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik

		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
43	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan
44	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti		Meter	Memperlancar aliran air buangan pada kawasan permukiman/meningkatnya kualitas teknis drainase jalan sehingga memperlancar aliran air buangan
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan

45	Towuti	Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu		Meter	Bangunan pelengkap jalan dalam Kawasan Permukiman/meningkatnya kualitas teknis jalan sehingga memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa
		Biaya Desain Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu	1	Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang baik
		Biaya Supervisi Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Sistem Pengawasan yang baik
		Biaya Administrasi Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu	1	Ls	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi sesuai yang direncanakan

#### E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Program : Kawasan Permukiman

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

No.	Lokasi	Rincian Menu Kegiatan	Sumber Dana	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)
1	Tersebar Kab. Luwu Timur	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur	APBD	1	300.000.000,00	300.000.000,00

		Biaya Desain Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur	APBD	1	9.000.000,00	9.000.000,00
		Biaya Supervisi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur	APBD	1	9.000.000,00	9.000.000,00
		Biaya Administrasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kab-Luwu Timur	APBD	1	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Wotu	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
3	Tomoni Timur	Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong 5 Dusun Wonosari Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Malili	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balantang Kec. Malili	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
5	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pekaloa Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
6	Wotu	Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	45.000.000,00	45.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	1.350.000,00	1.350.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	1.350.000,00	1.350.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Plat Duicker Dusun Sumber Nyiur Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	2.025.000,00	2.025.000,00
7	Wotu	Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	45.000.000,00	45.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	1.350.000,00	1.350.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	1.350.000,00	1.350.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai Kec. Wotu	APBD	1	2.025.000,00	2.025.000,00

Program : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

No.	Lokasi	Rincian Menu Kegiatan	Sumber Dana	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)
1	Malili	Pembangunan Trotoar Kawasan Lingkungan Permukiman Kelurahan Malili Kec. Malili	APBD	1	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Trotoar Kawasan Lingkungan Permukiman Kelurahan Malili Kec. Malili	APBD	1	54.000.000,00	54.000.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Trotoar Kawasan Lingkungan Permukiman Kelurahan Malili Kec. Malili	APBD	1	50.000.000,00	50.000.000,00
2	Burau	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau	APBD	1	160.000.000,00	160.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau	APBD	1	4.800.000,00	4.800.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau	APBD	1	4.800.000,00	4.800.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau	APBD	1	8.000.000,00	8.000.000,00

3	Wotu	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	APBD	1	350.000.000,00	350.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	APBD	1	10.500.000,00	10.500.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	APBD	1	10.500.000,00	10.500.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Marannu Dusun Muktisari Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	APBD	1	12.250.000,00	12.250.000,00
4	Malili	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
5	Malili	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00

		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
6	Malili	Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Masjid Nurul Ilham Labose Desa Laskap Kec. Malili	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
7	Wasuponda	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	APBD	1	170.000.000,00	170.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	APBD	1	5.100.000,00	5.100.000,00

		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	APBD	1	5.100.000,00	5.100.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	APBD	1	7.650.000,00	7.650.000,00
8	Wasuponda	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda	APBD	1	170.000.000,00	170.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda	APBD	1	5.100.000,00	5.100.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda	APBD	1	5.100.000,00	5.100.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda	APBD	1	7.650.000,00	7.650.000,00
9	Wasuponda	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	APBD	1	170.000.000,00	170.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	APBD	1	5.100.000,00	5.100.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	APBD	1	5.100.000,00	5.100.000,00

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	APBD	1	7.650.000,00	7.650.000,00
10	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelor Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
11	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Semeru Desa Wawondula Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00

12	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
13	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Maitara Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
14	Towuti	Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00

		Biaya Desain Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Akses Jalan Masuk SDN Parahua Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
15	Towuti	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nias Desa Asuli Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
16	Towuti	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	135.000.000,00	135.000.000,00
		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	4.050.000,00	4.050.000,00

		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	4.050.000,00	4.050.000,00
		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	6.750.000,00	6.750.000,00
17	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Roa Desa Langkea Raya Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
18	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 3 Dsn. Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
19	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Sinea Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
20	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 Jl. Tepoasoa Dusun Belira Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00

21	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
22	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ayam Desa Matompi Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
23	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00

		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
24	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Masiku Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
25	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
26	Towuti	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
27	Towuti	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Administrasi Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
28	Towuti	Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
29	Burau	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lambara Harapan Kec Burau	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00

30	Burau	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bonepute Kec. Burau	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
31	Burau	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Marannu Desa Lambara Harapan Kec. Burau	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
32	Wotu	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00

		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Lera Kec. Wotu	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
33	Wotu	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
34	Wotu	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Supervisi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Madani Kec. Wotu	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
35	Kalaena	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
36	Angkona	Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona	APBD	1	135.000.000,00	135.000.000,00
		Biaya Desain Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona	APBD	1	4.050.000,00	4.050.000,00
		Biaya Supervisi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona	APBD	1	4.050.000,00	4.050.000,00

		Biaya Administrasi Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Mertaguna Lr.2 Desa Mantadalu Kec. Angkona	APBD	1	6.750.000,00	6.750.000,00
37	Angkona	Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6a Desa Wanasari Kec Angkona	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
38	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok A Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00

39	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok C Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
40	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	135.000.000,00	135.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	4.050.000,00	4.050.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	4.050.000,00	4.050.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Blok D Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	APBD	1	6.750.000,00	6.750.000,00
41	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00

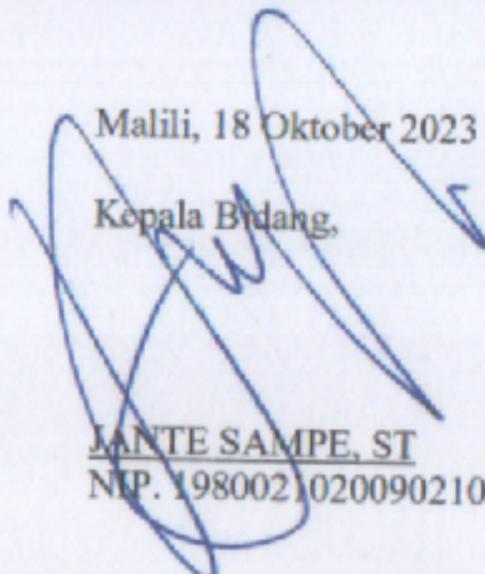
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kalosi Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
42	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tole Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
43	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rante Angin Kec. Towuti	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
44	Towuti	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD		180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD		5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD		5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Administrasi Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Bantilang Kec. Towuti	APBD		8.100.000,00	8.100.000,00
45	Towuti	Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu	APBD	1	180.000.000,00	180.000.000,00
		Biaya Desain Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00
		Biaya Supervisi Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu	APBD	1	5.400.000,00	5.400.000,00

		Biaya Administrasi Pembangunan Proteksi Jalan Lingkungan Desa Kanawatu Kec. Wotu	APBD	1	8.100.000,00	8.100.000,00
--	--	--	------	---	--------------	--------------

Malili, 18 Oktober 2023

Kepala Bidang,

  
JANTE SAMPE, ST

NIP. 198002102009021003

1. **Nama OPD** : **DPKPP Kabupaten Luwu Timur**
2. **Program** : **Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.**
3. **Kegiatan** : **Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota**
4. **Lokasi Kegiatan** : **Tersebar di wilayah Kabupaten Luwu Timur**
5. **PPTK** : **REYNAL RUSTAM, SE**

### **Latar Belakang**

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Dan pada saat manusia meninggalpun masih memerlukan tanah untuk menguburnya begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat, karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya alam yang alami yang bersifat tetap serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan, maka di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak

### **6. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni:

- i. Menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya;
- ii. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan RTRW;
- iii. Memberikan kepastian nilai ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak penerima ganti kerugian dalam proses penilaian publik;
- iv. Memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah;

### **7. Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD Pokok sebesar Rp. 10.426.000 (*terbilang : Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah*),

### **8. Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah :

- a. mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;
- b. melakukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;
- c. melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan.

**9. Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pemerintah daerah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan Umum yang pengadaan tanahnya dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

**10. Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah persentase Luas lahan yang dibebaskan dengan target 100%.

**11. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan Kepala DPKPP tentang PPTK/PPK
2	Konsultasi Publik	Konsultasi Publik dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dengan melibatkan pihak yang berhak serta masyarakat yang terkena dampak
3	SK Penetapan Lokasi	Penetapan lokasi atas lokasi pembangunan objek pengadaan tanah
4	Penetapan jasa Penilai Publik	Penilai pertanahan yang melakukan penilaian secara independent dan professional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah
5	Penetapan nilai ganti kerugian	Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai public, menjadi dasar musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian.
6.	Penyerahan Hasil	Dokumen Hasil Penilaian yang diserahkan oleh Tim Penilai Publik Kepada Pemda



**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN T.A. 2024**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Triwulan IV N ov s	
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	De s			
1	Belanja Alat Tulis Kantor	366.000		100.000				100.000							66.000	
2	Belanja Bahan Kegiatan kantor	460.000	200.000			200.000						60.000				
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	200.000					300.000					100.000			
4	Belanja Penggandaan/cetak	400.000		100.000				200.000				100.000				
5	Belanja Benda Pos	540.000		200.000			300.000						40.000			
6	Belanja Bahan Komputer	500.000				250.000					250.000					
7	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000		3.000.000				2.000.000					2.000.000		560.000	
	<b>Total</b>	<b>10.426.000</b>		<b>4.050.000</b>				<b>3.350.000</b>					<b>2.400.000</b>		<b>626.000</b>	

Mailli, Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas, selaku PPK



**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina TK.I

Nip. 19740323 200312 1 004

1. **Nama OPD** : **DPKPP Kabupaten Luwu Timur**
2. **Program** : **Penatagunaan Tanah**
3. **Kegiatan** : **Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kab/Kota**
4. **Sub. Kegiatan** : **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kab/Kota**
5. **Lokasi Kegiatan** : **Tersebar dalam Wilayah Kab. Luwu Timur**
6. **PPTK** : **Reynal Rustam, SE**

#### A. **Latar Belakang**

Aset atau barang milik daerah merupakan salah unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian nilai.

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hokum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan menghindari terjadinya persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan perbuatan hokum yang dilakukan oleh pemilikinya. Akibat adanya persengketaan dibidang pertanahan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara warga masyarakat dengan pemda karena tidak adanya kepastian hokum.

Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hokum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

#### b) **Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai kegiatan ini melalui sub kegiatan, yakni:

1. *Sertifikasi Tanah Aset Pemda* dapat Memberikan kepastian hukum atas tanah milik Pemerintah Daerah;
2. Pemasangan tanda batas (Patok pipa besi) dilapangan terhadap lokasi tanah pemda yang akan disertifikatkan;
3. *Jasa Pengukuran Tanah pengembalian batas* untuk mediasi penanganan permasalahan aset pertanahan dan terlaksananya identifikasi, monitoring dan supervisi aset tanah Pemda.

#### c) **Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 163.780.000 (*terbilang : Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*.

#### d) **Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah jumlah fasilitas yang dilaksanakan terkait pengendalian pemanfaatan tanah aset pemda sebanyak 86 unit, dengan rincian sbb :

- Sertifikat asset Pemda sebanyak 5 persil;
- Pengembalian Batas sebanyak 1 persil
- Patok Pipa Besi tanda batas pensertifikatan, sebanyak 80 bh

#### e) **Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah persentase tanah aset Pemerintah Daerah yang ditata dengan target 100%.

**f) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah persentase lahan yang bersertifikat dengan target 40,15%.

**g) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke OPD	- Melakukan Persuratan ke Bidang aset BPKD untuk permintaan daftar usulan tanah aset pemda yang belum disertifikatkan; - Pemberitahuan jadwal rapat pembahasan permasalahan pertanahan
3	Identifikasi dan inventarisasi	- Daftar usulan pensertifikatan dari Bidang Aset BPKD, dilakukan inventarisasi alas hak sebagai dasar dan bukti penguasaan aset tanah Pemerintah Daerah; - Identifikasi dilapangan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari lokasi konflik tanah pemda
4	Pengukuran bidang tanah	- Melakukan pengukuran bidang-bidang tanah aset Pemerintah daerah yang akan dilakukan oleh Pihak Pertanahan sebagai Instansi Vertikal yang mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah; - Pengukuran pengembalian batas oleh BPN dengan dasar Sertifikat Hak Pakai Instansi;
5	Penyerahan Hasil dan pelaporan	- Pihak Pertanahan menyerahkan sertifikat aset Pemda sesuai daftar usulan pensertifikat yang dimohonkan oleh Pemerintah daerah; - Pelaporan hasil penanganan permasalahan pertanahan.



**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN T.A. 2024**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ke t.		
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.498.600		500.000			500.000				400.000					98.600	
2	Belanja jasa pengukuran tanah sertifikasi tanah aset pemda	57.500.000						57.500.000									
3	Belanja tanda Pengamanan (Patok Pipa Besi)	12.000.000			12.000.000												
4	Belanja jasa pengukuran tanah Pengembalian Batas	6.000.000				6.000.000											
5	Belanja Kertas dan Cover	575.000			255.000					300.000				20.000			
6	Belanja Cetak	689.400		200.000		200.000					200.000					89.400	
7	Belanja Materai	1.000.000			500.000			500.000									
8	Belanja Bahan Komputer	375.000			250.000		125.000										
9	Belanja Makanan/Minuman Rapat	2.000.000		1.000.000		1.000.000											
10	Belanja Perjalanan Dinas	82.142.000			30.000.000			30.000.000						20.000.000		2.142.000	
	<b>Total</b>	<b>163.780.000</b>		<b>44.705.000</b>		<b>96.125.000</b>		<b>20.620.000</b>		<b>2.350.000</b>							

Mallili, Agustus 2023  
 Plt. Kepala Dinas, selaku PPK



**ANDI WIJA HASAN, ST**  
 Pangkat : Pembina TK.I  
 Nip. 19740323 200312 1 004

<b>1.</b>	<b>Nama OPD</b>	<b>:</b>	<b>DPKPP Kabupaten Luwu Timur</b>
<b>2.</b>	<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>
<b>3.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>
<b>4.</b>	<b>Sub. Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</b>
<b>5.</b>	<b>Lokasi Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Tersebar dalam Wilayah Kab. Luwu Timur</b>
<b>6.</b>	<b>PPTK</b>	<b>:</b>	<b>Reynal Rustam, SE</b>

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang Agraris. Suasana agraris menjadi bagian tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemanfaatan tanah beserta kandungannya diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa Negara mempunyai peran besar dalam menguasai bumi, air dan ruang angkasa serta seluruh kekayaan alam didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setidaknya ada 2 fokus utama dalam pasal 33 UUD 1945. Pertama, Negara menguasai kekayaan alam Indonesia. Kedua, kekayaan alam yang dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agrarian yang tidak dapat dipisahkan, meliputi pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengaturan hak-hak atas tanah serta pendaftaran tanah.

Penetapan kegiatan penatagunaan tanah dilakukan dengan inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah rencana tata ruang wilayah serta kajian kondisi fisik wilayah.

Hukum izin perubahan penggunaan tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam, penerbitan izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.

#### **b) Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni:

1. Memberikan ijin pemanfaatan tanah dalam bentuk SK Penetapan lokasi;
2. Mengatur pemanfaatan dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

#### **c) Masukan (Input)**

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp5.080.000 (*terbilang : Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Rencana Kas penggunaan anggaran kegiatan *terlampir*

#### **d) Keluaran (Output)**

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah Jumlah Izin Lokasi yang difasilitasi" dengan target tiga (3) izin.

#### **e) Hasil (Intermediate Outcome)**

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah persentase tanah aset Pemerintah Daerah yang ditata dengan target 100%.

#### **f) Capaian Program (Outcome)**

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Permohonan tanah aset Pemerintah Daerah yang ditata dengan target 3 Izin.

**g) Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke OPD	Melakukan Persuratan ke OPD terkait, guna membahas permohonan izin lokasi yang dimohonkan oleh instansi yang membutuhkan .
3	Infestigasi dan inventarisasi lahan	Melakukan infestigasi dan inventarisasi calon lokasi yang akan dimanfaatkan dengan mengacu pada kesesuaian RTRW Kabupaten .
4	Pengajuan Nota Dinas SK izin lokasi	Membuat nota dinas ke Pimpinan tentang penetapan izin lokasi peruntukan lahan berdasarkan kebutuhan luas lahan dan kesesuai RTRW Kabupaten
5	SK penetapan ijin lokasi	Membuat SK Penetapan izin lokasi



**RENCANA KAS PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN T.A. 2024**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Penggunaan Anggaran (Rp)												Ke t.		
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000		300.000						200.000		100.000				70.000	
2	Belanja bahan cetak	180.000		100.000		80.000											
3	Benja Bahan Komputer	250.000				250.000											
3	Belanja Makan Minum Rapat	600.000		200.000				200.000					200.000				
4	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000		1.000.000				2.000.000					380.000				
	<b>Total</b>	<b>5.080.000</b>		<b>1.600.000</b>				<b>2.730.000</b>					<b>680.000</b>			<b>70.000</b>	

Malili, Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas, selaku PPK



**ANDI WIJA HASAN, ST.**

Pangkat : Pembina TK.I

Nip. 19740323 200312 1 004